



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu fenomena bagi setiap entitas organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan, baik pada lingkup organisasi privat maupun organisasi publik. Bangsa Indonesia yang sejatinya merupakan bagian dari masyarakat di dunia ini memiliki kewajiban berpartisipasi dan beradaptasi dalam mewujudkan setiap aspek yang berlaku dalam pola berkehidupan ataupun bermasyarakat, misalnya dalam hal ini aspek pemerintahan. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkannya. Febrian (2016:2) menjelaskan bahwa *Good Governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan Negara secara politik ekonomi dan administratif disemua tingkatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintahan Kabupaten Bogor yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD Kabupaten Bogor merupakan bagian dalam salah satu pengguna anggaran, bahkan turut andil dalam setiap pelaporan keuangan serta harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beberapa laporan yang harus dibuat yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Neraca, salah satu komponen yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu belanja.

Permendagri No.13 Tahun 2006 menjelaskan belanja dibagi menjadi belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung dan tidak langsung merupakan pengeluaran kas yang kegiatannya paling sering digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran. Dimana hal tersebut bisa dikatakan banyak menelan dan rawan terjadi penyelewengan.

Pada pengelolaan Belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, masih sering terjadinya keterlambatan dalam pencatatan dan pencairan dana untuk transaksi belanja, hal ini diakibatkan sering adanya gangguan dalam sistem aplikasi penatausahaan. Untuk meminimalisir terjadinya kendala sistem yang akan terjadi atau untuk mencegah adanya kesalahan, dibutuhkan kesiapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010 seperti SDM yang dipakai, program aplikasi yang digunakan, serta kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

pengelolaan akuntansi, khususnya belanja guna menghasilkan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi.

Atas dasar pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan Belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana penerapan SAP pada Belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin disampaikan penulis adalah

1. Mengetahui prosedur pengelolaan Belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan SAP pada Belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya untuk akuntansi pemerintah dalam hal pencatatan, pengakuan, dan penyajian belanja.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi
Adanya penulisan ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



- b. Bagi Instansi
Adanya penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal mengatasi kendala sistem kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam penerapan SAP pada pengelolaan dan realisasi Belanja.
- c. Bagi Penulis
Adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang penerapan SAP dalam pengelolaan dan realisasi Belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.